

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dibalik hubungan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang tentu tidak terlepas dari latar belakang dinamika kedua negara. Hubungan yang dimiliki oleh Indonesia dan Jepang telah terjalin sejak Indonesia belum mendeklarasikan kemerdekaannya. Sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, Jepang termasuk kedalam salah satu negara yang ingin menguasai Indonesia. Jepang mulai melakukan kolonialisme terhadap Indonesia pada tahun 1942-1945 setelah mengambil alih kekuasaan dari Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia (Uli, 2023). Status perang Indonesia dengan Jepang diakhiri dengan adanya perjanjian damai yang ditandatangani pada 20 Januari 1958 di Jakarta (*Embassy of Japan in Indonesia*, 2018). Perjanjian damai ini juga dianggap sebagai awal mula dari hubungan diplomatik kedua negara yang hingga saat ini telah berlangsung selama 66 tahun lamanya. Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik, keduanya akan selalu memperkuat kerja sama diberbagai bidang. Indonesia dan Jepang terus melakukan perkembangan kerja sama seiring berjalannya waktu. Salah satu perkembangan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang adalah kerja sama Paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan biasanya disebut dengan istilah *sister province* atau *sister city*, bisa juga disebut dengan *twinning city* yang berarti kerja sama antar kota luas yang kemudian disepakati secara resmi dan tentunya berjangka panjang (Mukti, 2013).

Kerja sama Paradiplomasi dengan Jepang telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia, diantaranya kerja sama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Yamanashi, Surabaya-Kochi, Surabaya-Kitakyūshū, Bandung-Hamamatsu, Bandung-Kawasaki, Bandung-Toyota City, dan lainnya. Dari berbagai kerja sama paradiplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Jepang, kerja sama paradiplomasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto termasuk kedalam kerja sama tertua antara Indonesia dengan Jepang. Kerja sama ini sudah berlangsung selama kurang lebih 35 tahun.

Kerja sama Paradiplomasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto dianggap sebagai salah satu kerja sama *sister province* yang dinilai paling produktif di Indonesia. Kerja sama ini termasuk dalam kerja sama yang masih aktif dilaksanakan semenjak dimulai dan diresmikan pada 16 Juli 1985. Awal mula terjalinnya kerja sama *sister province* DIY dan Kyoto ini didukung oleh faktor historis dari masing-masing pihak yaitu adanya kesamaan antara kedua provinsi. Kesamaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto ialah keduanya merupakan bekas ibukota negara yang memiliki nilai-nilai perjuangan. Selain faktor historis, terbentuknya kerja sama *sister province* ini disebabkan oleh hubungan pribadi antara kedua pemimpin yaitu Sultan Hamengkubuwono IX yang pada Perang Dunia II bersahabat dekat dengan Yukio Hayashida tentara Jepang di Yogyakarta dan nantinya akan menjadi gubernur Kyoto. *Prefecture* Kyoto dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan daerah budaya dan daerah tujuan wisata nasional maupun internasional, keindahan alam kedua provinsi dianggap dapat diandalkan bagi pengembangan pariwisata dan pusat pendidikan. Terjalannya kerja sama yang dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan oleh *Prefecture* Kyoto ini sudah berjalan selama kurang lebih 35 tahun. Kerja sama ini pun dilandasi dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan setiap lima tahun sekali dilakukan untuk perpanjangan yang disebut dengan penegasan ulang atau *reaffirmation* yaitu penandatanganan kembali MoU yang sudah disepakati (Mukti, 2013).

Pada *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto, bidang kerja sama yang disetujui meliputi bidang Seni dan Budaya, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Pariwisata serta Industri. Selama kurang lebih 35 tahun berjalannya kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto, bidang kerja sama yang dilakukan masih sesuai dengan kesepakatan pada *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama. Pada saat pelaksanaan reaffirmasi *Memorandum of Understanding* (MoU) tahun 2010, diketahui bahwa dalam kerja sama ini bidang pariwisata dan bidang kebudayaan menjadi agenda prioritas bagi kedua provinsi (PEMDA DIY, 2010). Hal ini karena pada periode sebelumnya yaitu semenjak tahun 2005 telah diselenggarakan berbagai pertemuan dan simposium untuk mendorong kerja sama di sektor ini (Mukti, 2013). Kemudian, pada perpanjangan atau reaffirmasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama tahun 2015 terdapat sebuah kesepakatan untuk melakukan penguatan kerja sama, serta ditambah dengan adanya *minute of discussion* dari delegasi Daerah

Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto yang mana menghasilkan kesepakatan berupa penguatan dalam tiga bidang yaitu Pendidikan, Pariwisata, dan Kebudayaan (Alfarisi, 2021). Dilihat dari kesepakatan yang dihasilkan dari reafirmasi *Memorandum of Understanding* (MoU) 2015 tentunya akan mempengaruhi implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto pada tahun 2015-2020. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi bidang kerja sama yang terdapat pada *Memorandum of Understanding* (MoU) Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto ditahun 2015-2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan Kyoto, Jepang ditahun 2015-2020?

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konsep Paradiplomasi**

Dikutip dari buku yang berjudul *Paradiplomacy* Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia oleh Takdir Ali Mukti, Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', atau pemerintah *regional*/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah *paradiplomacy* pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*'; menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy*'(Mukti, 2013).

Konsep paradiplomasi bisa disebut juga dengan kerja sama *sister province*, *sister city* atau *twinning city*. Kerja sama yang dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto bisa dikatakan sebagai kerja sama paradiplomasi. Hal ini karena kerja sama kedua pihak berasal dari pemerintah *regional*/pemda di masing-masing negara. Kerja sama ini tentu saja didukung oleh faktor historis yaitu kesamaan dari kedua provinsi yang kemudian bisa

bekerja sama dan disebut sebagai paradiplomasi *sister province*. Kedua daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto merupakan bekas ibukota negara yang memiliki nilai-nilai perjuangan. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto juga merupakan daerah budaya dan daerah tujuan wisata nasional maupun internasional. Keduanya memiliki keindahan alam yang dianggap bisa diandalkan bagi pengembangan pariwisata serta pusat pendidikan. Oleh karena itu, banyaknya kesamaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto membuat kedua daerah ini menjalin kerja sama paradiplomasi.

## 2. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Berdasarkan buku *Diplomasi Kebudayaan* yang ditulis oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, pengertian diplomasi secara konvensional ialah sebagai usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional. Sedangkan pengertian kebudayaan secara makro atau umum adalah segala hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan. Namun, ada juga yang mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan mikro merupakan yang termanifestasikan dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Lalu, mikro yang lebih sering dianggap sebagai konvensi adalah kebudayaan yang menitik beratkan pada pemanfaatan “kesenian”(Warsito & Kartikasari, 2007).

Dengan demikian, menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, atau pun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer.

Tabel 1. 1 Hubungan antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan

SITUASI	BENTUK	TUJUAN	SARANA
DAMAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksibisi</li> <li>• Kompetisi</li> <li>• Pertukaran Missi</li> <li>• Negosiasi</li> <li>• Konferensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan</li> <li>• Hegemoni</li> <li>• Persahabatan</li> <li>• Penyesuaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata</li> <li>• Olah Raga</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Kesenian</li> </ul>
KRISIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propaganda</li> <li>• Pertukaran Missi</li> <li>• Negosiasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persuasi</li> <li>• Penyesuaian</li> <li>• Pengakuan</li> <li>• Ancaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik</li> <li>• Mass Media</li> <li>• Diplomatik</li> <li>• Missi Tingkat Tinggi</li> <li>• Opini Publik</li> </ul>
KONFLIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terror</li> <li>• Penetrasi</li> <li>• Pertukaran Missi</li> <li>• Boikot</li> <li>• Negosiasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman</li> <li>• Subversi</li> <li>• Persuasi</li> <li>• Pengakuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini Publik</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Para Militer</li> <li>• Forum Resmi</li> <li>• Pihak Ketiga</li> </ul>
PERANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetisi</li> <li>• Terror</li> <li>• Penetrasi</li> <li>• Propaganda</li> <li>• Embargo</li> <li>• Boikot</li> <li>• Blokade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominasi</li> <li>• Hegemoni</li> <li>• Ancaman</li> <li>• Subversi</li> <li>• Pengakuan</li> <li>• Penaklukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Militer</li> <li>• Para Militer</li> <li>• Penyelundupan</li> <li>• Opini Publik</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Supply Barang Konsumtif (termasuk senjata)</li> </ul>

Menurut konsep diplomasi kebudayaan yang ditulis oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, kerja sama paradiplomasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto termasuk kedalam situasi damai. Hal ini karena sebelumnya, Indonesia-Jepang telah melakukan perjanjian damai yang menjadi awal dari hubungan diplomatik keduanya. Bentuk dari kerja sama kedua daerah merupakan bentuk eksibisi, pertukaran missi, dan negosiasi. Tujuan dari kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto adalah untuk persahabatan. Untuk mewujudkan tujuan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto, sarana yang digunakan ialah sarana pariwisata, pendidikan, kesenian, dan perdagangan.

#### D. Hipotesa

Implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-*Prefecture* Kyoto 2015-2020 dilatar belakangi oleh

konsep paradiplomasi, yang dimana kedua provinsi tersebut memiliki kesamaan faktor historis. Implementasi dilakukan dalam bentuk eksibisi, pertukaran misi, dan negosiasi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan Kyoto, Jepang tahun 2015-2020.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan Kyoto, Jepang tahun 2015-2020. Pada penelitian ini penulis berfokus pada kerja sama yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan Kyoto, Jepang tahun 2015-2020.

#### **G. Metode Pengumpulan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan pengumpulan dan analisis data sekunder yang bisa didapatkan melalui interview untuk data primer, buku, jurnal, surat kabar dalam bentuk elektronik ataupun cetak fisik, dan media lain yang memiliki sumber terpercaya dan berkaitan dengan penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini sistematika yang digunakan sebagai berikut:

- **BAB I** berisi konstruksi skripsi secara keseluruhan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.
- **BAB II** menjelaskan mengenai latar belakang *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto tahun 2015-2020.
- **BAB III** menjelaskan mengenai reafirmasi dan implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama *sister province* Daerah Istimewa Yogyakarta dan *Prefecture* Kyoto tahun 2015-2020.
- **BAB IV** menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian.